

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan- keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas¹. Secara sederhana demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara, seperti yang telah dikemukakan oleh Abraham Lincoln bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masyarakat atau rakyat memiliki peran penting dalam sistem demokrasi².

Dalam kehidupan sistem demokratis, rakyat memunyai hak untuk memilih para wakilnya yang terhimpun dalam partai politik untuk duduk di parlemen, memilih pemimpin yang akan memerintah negara tersebut, dan memunyai hak untuk terlibat aktif dalam kontestasi politik itu sendiri (hak dipilih). Hak memilih dan dipilih ini bahkan merupakan salah satu indikator pembeda antara sistem demokratis dan sistem lain yang dianggap non-demokratis³.

Salah satu parameter tumbuhnya demokrasi adalah semakin terbukanya kesempatan bagi warga negara dalam partisipasi politik. Bentuk konkret

¹Miriam Budiardjo, 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.hal.109

²Ahmad Yusuf,2014. Pengaruh Persepsi Masyarakat Pada Caleg Terhadap Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif 2014 Di Sidoarjo. *Jurnal Review Politik Volume 04, Nomor 02*, Desember 2014 Lembaga Pendidikan Al-Furqon Sidoarjo

³Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff,2009.Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, Jurnal Poelitik Volume 5/No.1/UNNAS

partisipasi politik yang mudah ditemui dalam kehidupan berdemokrasi adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilu (pemilihan umum), yang mana pemilu sendiri merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat (pemberian suara) yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil⁴. Menurut Denver sebagaimana dikutip Asrinaldi, pemilu juga merupakan sarana menuju kehidupan demokrasi yang melibatkan perilaku politik masyarakat yang bersifat masih dalam menentukan siapa yang memerintah. Tentunya dengan mempelajari perilaku politik masyarakat, seseorang dapat memahami bagaimana proses demokrasi itu bekerja serta sejauhmana hasil pilihan dalam pemilu tersebut berkualitas dan mampu melahirkan pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat⁵. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu sangat terkait dengan perilaku mereka .

Selama ini, perilaku yang dilakukan masyarakat dalam memberikan suaranya pada pemilu disebut juga dengan perilaku memilih (*Voting Behavior*). Perilaku memilih menurut Surbakti sebagaimana dikutip Fachri , yaitu aktivitas pemberian suara oleh seseorang yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih pada suatu pemilihan umum⁶. Kajian atas perilaku memilih bukan saja dimanfaatkan untuk mendulang suara, namun terutama untuk melihat dan memahami konstelasi harapan dan kepentingan rakyat dalam konteks politik demokratik⁷. Sebenarnya perilaku memilih merupakan bentuk partisipasi politik aktif dan yang paling kecil dari masyarakat karena hanya

⁴Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum

⁵Asrinaldi, 2012, *Politik Masyarakat Miskin Kota*, Yogyakarta : Gava Media. hlm. 24.

⁶Lihat M.Fachri Adnan,2010.*Tingkah laku Mengundi Pada Pemilihanraya Gubernur Sumatera Barat 2005*.DisertasiDoktorFalsafah, Tidak Dipublikasikan ,Universitas Utara Malaysia

⁷Sofian Munawar Asgart, Perilaku Pemilih di KotaYogyakarta: *Fenomena Pemilu 2004 dan 2009*, Master Fisipol UGM, diakses dari www.kompasiana.com/sagart. 5 September 2015, pukul 19:46WIB

menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana⁸. Meskipun demikian perilaku memilih menjadi sebuah obyek penelitian menarik bagi para ilmuwan sosial, termasuk perilaku memilih di Indonesia. Hal ini dikarenakan pluralitas yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu kemajemukan suku, agama, ideologi, aliran dan budaya politik dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku memilih masyarakat terhadap pemilihan partai maupun calon tertentu.

Dalam lingkup Indonesia, studi tentang perilaku memilih baik itu di tingkat daerah (Pilkada), dewan (Dewan Perwakilan Rakyat [DPR]/Dewan Perwakilan Daerah [DPD]), maupun presiden beserta wakilnya telah menjadi perhatian ilmuwan politik sejak Orde Baru hingga Era Reformasi. Terlihat bahwa ilmuwan seperti Gaffar⁹(1992) dan Kristiadi (1993)¹⁰ merupakan pelopor studi perilaku memilih di Indonesia yang melakukan penelitian tentang perilaku memilih pada masa Orde Baru. Selanjutnya ada Leo Agustino (2003)¹¹, Muhammad Asfar (2006)¹², Mujani dkk (2012)¹³, dan Fachri Adnan (2010)¹⁴ yang melakukan studi perilaku memilih pada era reformasi.

Studi perilaku memilih mulai menjadi *trend* di Indonesia paska reformasi 1998 dengan diberlakukannya pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada secara langsung. Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang benar-benar dapat menjadi sarana

⁸Afan Gaffar, 1992, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under Hegemone*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, , Hal 2

⁹*Ibid*

¹⁰Lihat Josef Kristiadi, 1993. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Suatu Studi Kasus tentang Perilaku Pemilih di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Banjar negara, JawaTengah Pada Pemilu 1971-1987*, Disertasi. Tidak Dipublikasikan. UniversitasGadjahMadaYogyakarta

¹¹Lihat LeoAgustino, 2003. *Perubahan perilaku pemilih: kasus Jawa Barat pada pemilihan umum 1999*. Tesis Magister Ilmu Politik, Tidak Dipublikasikan, FISIP, Universitas Indonesia

¹²MuhammadAsfar, 2006 *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya: PustakaEureka

¹³Saiful Munjani, R. William Liddle, Kuskridho Ambardi, 2012. *KuasaRakyat*. Jakarta: Mizan Pubika

¹⁴Fachri, 2010. *Op.cit*

pelaksana kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan dalam iklim kontestasi terbuka dan demokratis, lepas dari bayang- bayang hegemoni rezim dan mobilisasi kekuasaan layaknya pada masa Orde Baru. Indonesia paska reformasi tercatat telah melaksanakan pemilu nasional sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Hasil Pemilu menjadi sangat dinamis yakni partai pemenang Pemilu mengalami pergeseran atau perubahan dari Pemilu ke Pemilu. Sebagai contoh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang pada Pemilu 1999 diawal reformasi, tetapi kemudian kalah pada Pemilu 2004 dan 2009 dan menjadi pemenang kembali pada Pemilu 2014. Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan partai yang paling stabil perolehan suaranya secara nasional. Pada empat kali pelaksanaan Pemilu pasca reformasi, Partai Golkar selalu menempati urutan 2 (dua), kecuali pada Pemilu tahun 2004 dimana Partai Golkar keluar sebagai pemenang Pemilu.

Dinamika pemilu era ini juga diwarnai munculnya partai-partai baru yang terbukti mampu menjadi partai besar. Partai Demokrat yang lahir pada tahun 2001 menjelang Pemilu 2004, berhasil menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2009 serta kemudian masuk lima besar pada Pemilu 2014. Lonjakan fantastis ditemukan pada Partai Gerindra. Partai yang baru berdiri menjelang Pemilu 2009 ini mampu memperoleh suara signifikan dan perolehan suaranya berada pada urutan ke delapan pada Pemilu 2009. Selanjutnya, pada Pemilu 2014 Partai Gerindra berhasil menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak ketiga (Lihat Lampiran II dan III). Partai-partai yang telah ada sejak zaman Orde Baru seperti Golkar, PDIP dan PPP pada Pemilu-Pemilu di Era Reformasi terbukti masih memiliki basis konstituen yang stabil, ditunjukkan dengan perolehan suara

yang tetapi berada pada perolehan 5 besar, kecuali PPP yang grafik perolehan suaranya naik-turun seiring munculnya partai-partai baru yang berbasiskan Islam seperti PKB, PKS dan PAN.

Dinamika perubahan dan pergeseran perolehan suara partai politik ditingkat nasional juga hampir sama dengan perolehan suara partai politik pada Pemilu di Kota Bukittinggi. Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Bukittinggi dengan kata lain memperoleh kursi untuk anggota DPRD Kota yaitu Partai Gerindra yang memperoleh suara terbanyak untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota. Pada urutan kedua ditempati oleh Partai Golkar dan selanjutnya di posisi ketiga ditempati oleh Partai Demokrat untuk DPRD Kota. (terlihat pada lampiran III).

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Bukittinggi peraih peringkat pertama untuk DPRD Kota yaitu Partai Demokrat. Partai ini bisa dikatakan partai baru yang langsung naik di posisi strategis. Posisi kedua diraih oleh PKS baik di DPRD Kota. Selanjutnya pada posisi ketiga diraih oleh Partai Golkar pada ketiga lembaga perwakilan masyarakat tersebut (terlihat pada lampiran III).

Berbeda halnya pada Pemilu Legislatif 2004, Partai Golkar yang merupakan partai lama menduduki posisi pertama dalam pemilihan DPRD Kota, Pada posisi kedua ditempati oleh Partai Amanat Nasional dan untuk posisi ketiga ditempati oleh PKS (terlihat pada lampiran III).

Tabel 1.1**PERBANDINGAN PEROLEHAN HASIL PEMILU DPRD KOTA**

Urutan	PEMILU								
	2004	Suara	%	2009	Suara	%	2014	Suara	%
1	GOLKAR	10.080	23,62%	DEMOKRAT	13.755	31,71%	GERINDRA	7.566	15.99%
2	PAN	7.908	18,53%	PKS	4.931	11,37%	GOLKAR	7.233	15.28%
3	PKS	6.418	15,04%	GOLKAR	4.625	10,66%	DEMOKRAT	6.941	14.67%
4	PBB	4.422	10,36%	PAN	3.521	8,12%	PPP	6.227	13.16%
5	PPP	3.755	8,80%	PPP	3.498	8,06%	PAN	5.634	11.90%

Sumber : KPU Kota Bukittinggi

Terhadap fakta-fakta tersebut diatas, diketahui terdapat perubahan pilihan politik pemilih antara Pemilu 2004, 2009 dan 2014 di Kota Bukittinggi. Perubahan politik ini bisa juga dikatakan bahwa faktor cinta terhadap dengan salah satu partai masih kelihatan. Hal ini terlihat bahwa partai Golkar yang merupakan salah satu yang tergolong 3 partai besar di zaman orde baru masih berada diposisi 3 besar, partai PAN di 3 kali pemilihan masih berada di lini 5 besar, begitu juga PPP yang juga merupakan salah satu partai lama di Indonesia. Hal ini yang mendasar bagi peneliti melihat sejauhmana kekuatan kepartaian di lingkungan masyarakat kota bukittinggi. Melihat hal diatas partai lama juga masih bisa meraih posisi strategis walaupun kemunculan partai baru tidak bisa dipungkiri popularitasnya.

Selain itu Peneliti juga berasumsi bahwa penyebab perubahan perolehan suara partai politik tersebut dikarenakan perilaku memilih masyarakat kota bukittinggi yang tergolong dalam menentukan pilihannya masih melihat kepada tokoh baik tokoh yang akan di pilih maupun tokoh partai politik tersebut. Hal ini

tergambar pada pra Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 sosok Prabowo di anggap sebagai penjabaran pemikiran Bung Karno tentang nasionalisme, kesejahteraan rakyat NKRI. Hal ini mampu membawa Partai Gerindra menduduki posisi pertama di ajang pemilihan legislatif 2014 di kota Bukittinggi. Selain itu dikota Bukittinggi masih mengagung bahwa wajah –wajah lama yang masih di minati bagi masyarakat sebagai contoh masih terdapat delapan orang anggota DPRD Bukittinggi periode 2009-2014 yang kembali terpilih menjadi wakil rakyat periode 2014-2019 adalah: Yontrimansyah, Hj.Nursyida,dan Hj. Aisyah dari Partai Demokrat, M. Nur Idris dan Fauzan Havis dari PAN, Ibnu Azis dari PKS, Yusra Adek dari Partai Golkar dan Yuneva Arianto dari PPP¹⁵.

Kota Bukittinggi juga memiliki masyarakat yang cerdas dalam memilih, hal ini tergambar bahwa bahwa beberapa tahun belakangan keadaan ekonomi merosot terlihat bahwa adanya kenaikan harga BBM yang terjadi 5 kali semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kenaikan ini berimpas pada keadaan ekonomi terutama ekonomi masyarakat. Dalam hal ini peneliti juga berasumsi bahwa efek ekonomi ini berimpas pada menurunnya jumlah suara yang di dapati oleh partai tertentu yang mendukung program pemerintah yang salah satunya merosotnya keterpilihan anggota dari Partai Demokrat. Selain itu juga terdapat khusus beberapa anggota partai ini juga berdampak pada keinginan untuk memilih kembali partai tersebut.

Berbicara tentang studi perilaku memilih tidak terlepas dari tiga model pendekatan yang mempengaruhi perilaku memilih seseorang dalam memberikan pilihannya, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan

¹⁵<http://www.bukittinggi.info/2014/09/25-orang-anggota-dprd-bukittinggi.html>. html. 5
September 2015, Pukul 19:03WIB

rasional (ekonomi)¹⁶. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang pertama dalam studi perilaku memilih. Pendekatan ini berkembang pada tahun 1950an yang berkembang di Eropa dan Amerika. Pendekatan ini di asumsikan bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik kelas Sosial/Status Sosioekonomis, Agama dan Ras/Etnik. Selanjutnya model pendekatan psikologis yaitu pemilih untuk menentukan pilihannya ditentukan dari kedekatannya dengan partai (identitas /Identifikasi Partai) , kedua Orientasi Kandidat atau Kualitas Calon dan Orientasi Isu-isu atau Tema Kampanye. Terakhir ada Pendekatan Rasional yang di asumsikan bahwa pemilih untuk menentukan pilihannya berdasarkan evaluasi kinerja pemerintah, janji partai masa kampanye dan persepsi kandidat tentang isu. Secara sederhana pendekatan rasional ini dapat di turunkan menjadi seorang pemilih untuk menentukan pilihannya berdasarkan keuntungan ekonomi¹⁷.

Jika kita merujuk pada beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor atau variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku memilih di Indonesia, variabel tersebut adalah identifikasi partai, orientasi kandidat, dan evaluasi ekonomi¹⁸. Ketiga variabel ini merupakan variabel-variabel yang pada beberapa penelitian menjadi variabel paling berpengaruh yang mempengaruhi perilaku memilih pada masyarakat Indonesia. Ketiga variabel ini meliputi pendekatan psikologis dan pendekatan rasional . Dalam studi-studi tentang perilaku memilih sebelumnya diIndonesia, pendekatan sosiologis diketahui tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku memilih. Meskipun variabel agama sering muncul sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku memilih, namun

¹⁶ Kristiadi.1993. *Op.Cit.*, hal 23-34

¹⁷Dijelaskan pada BabTinjauan Pustaka

¹⁸Penelitian yang dimaksud adalah penelitian Affan Gaffar, J. Kristiadi, Saiful Munjani , Muhammad Asfar, dan Leo Agustino. Penjabaran lebih lanjut terhadap penelitian terdahulu ini akan dijelaskan pada BabTinjauan Pustaka

trend perilaku memilih tidak lagi menjadikan struktur sosial seperti agama, pendidikan, tingkat pendapatan, jenis kelamin, etnis sebagai faktor yang mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam Pemilu¹⁹. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis tidak digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor perilaku memilih.

Merujuk kepada variabel, identifikasi partai merupakan variabel yang paling sering muncul dalam penelitian-penelitian terdahulu. Menurut Campbell, et.al. 1960 sebagaimana dikutip Munjani mengatakan konsep ini secara umum diartikan sebagai orientasi afeksi individu terhadap kelompok kepentingan dalam masyarakat. Orientasi afeksi merupakan sikap atau perasaan seseorang terhadap partai politik, bisa positif dan bisa juga negatif. Identifikasi partai dipercaya punya pengaruh yang kuat dan luas terhadap berbagai sikap politik (seperti sikap terhadap kebijakan publik, evaluasi atas kinerja pemerintahan, evaluasi terhadap partai dan terhadap calon), dan terhadap perilaku politik seperti partisipasi politik, pilihan partai atau calon DPR, pilihan atas calon presiden, atau pilihan terhadap isu kebijakan publik tertentu²⁰.

Hasil studi Mujani bahwa faktor identifikasi partai dan pilihan partai secara umum hampir identik. Oleh karena itu, bila jumlah orang yang mengidentifikasi diri dengan partai menurun tajam, maka tingkat stabilitas dukungan pada partai tersebut akan menurun tajam juga. Sebaliknya, bila jumlahnya meningkat, maka tingkat stabilitas dukungan pada partai akan semakin

¹⁹Penelitian Saiful Munjani dkk (2009) menyimpulkan jika faktor sosiologis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku memilih masyarakat dan trend ini akan terus terjadi seiring semakin menguatnya identifikasi kepartaian, orientasi kandidat dan *rational choice*.

²⁰Munjani, 2012 *Op. Cit.*, hal. 373-374.

kuat²¹. Selain variabel identifikasi partai, variabel lain yang memiliki pengaruh Kuat terhadap perilaku memilih adalah variabel orientasi kandidat. Dalam konteks demokrasi baru dimana pelembagaan partai belum tertata secara baik, tokoh partai memiliki kemungkinan untuk menjadi magnet penarik massa pemilih partai dan bahkan pembentuk identitas partai. Ketika seorang tokoh membentuk partai atau menjadi orang utama pada partai politik, maka daya tarik massa terhadap partai tersebut kemungkinan ditentukan oleh seberapa besar daya tarik tokoh partai bersangkutan bagi pemilih²².

Hasil penelitian Muhammad Asfar tentang perilaku memilih masyarakat Jawa Timur, mengidentifikasi bahwa kriteria paling kuat dari tokoh politik yang menjadi perspsi pemilih adalah faktor kesalehannya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ketaatan agama tokoh tersebut menjadi faktor penting bagi persepsi pemilih. Rakyat mendambakan pemimpin yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai atau ajaran agama, sebab tokoh yang memegang nilai-nilai keagamaan lebih kuat dianggap dapat dipercaya atau lebih jujur dibanding yang tidak taat²³.

Afeksi terhadap tokoh politik berhubungan dengan sikap partisan (identitas partai). Semakin kuat pemilih mempunyai afeksi terhadap seorang tokoh partai, maka ia semakin cenderung mengidentikkan diri dengan partai tokoh politik yang bersangkutan. Mereka yang suka Megawati Soekarno Puteri akan beridentitas PDIP, yang suka Prabowo Subianto akan beridentitas Partai Gerindra, yang suka

²¹*Ibid*,hal:399

²²Bakaruddin,dkk,“ Voting Behavior Pemilih Pemula Pada Pemilu 2004 di Kota Padang”, dalam buku *Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik*, 2012,Padang:Laboratorium Ilmu Politik,Fisip,Unand,hal.400-401

²³Asfar, 2006*Op. Cit*,hal:205

Amien Rais akan beridentitas PAN, yang suka Surya Paloh akan beridentitas Partai Nasdem, dan yang suka dengan SBY akan beridentitas Demokrat²⁴.

Variabel orientasi tokoh politik dalam kerangka perilaku memilih oleh Pomper²⁵ disebut sebagai variabel CE (*Candidate Evaluation*) dan masuk pada kategori pendekatan rasional. Hanya saja hal ini perlu dipahami secara hati-hati, sebab tokoh politik tidak hanya berkaitan dengan program dan evaluasi pemilih terhadap yang bersangkutan, akan tetapi seringkali juga dipahami dalam konteks kesukaan atau ketidaksukaan pemilih. Dalam konteks ini, pertimbangan-pertimbangan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor-faktor psikologis, seperti identifikasi terhadap tokoh²⁶. Terhadap hal ini nantinya penelitian akan mengidentifikasi apakah variabel orientasi tokoh politik lebih disebabkan oleh faktor rasional atau justru faktor psikologis.

Variabel lain berdasarkan hasil studi perilaku memilih di Indonesia cukup berpengaruh terhadap perilaku memilih adalah variabel evaluasi ekonomi yang terlingkup dalam khazanah pendekatan rasional. Pendekatan ini dibangun atas asumsi bahwa seorang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya (kehidupan ekonomi). Cukup dengan mempersepsikan keadaan ekonomi dirinya (*Egosentrik*) di bawah sebuah pemerintahan (*Partai atau calon*) tertentu sekarang ini dibanding sebelumnya (*Restrospektif*) dan yang akan datang dibanding sekarang (*Prospektif*), dan evaluasi umum seorang pemilih atas keadaan ekonomi nasional (*Sosiotropik*) di bawah pemerintahan sekarang dibanding tahun sebelumnya

²⁴*Ibid*, hal:432

²⁵Gerald Pomper, 1978, *Voters Choice: Varieties of American Electoral Behavior*. New York: Dodd, Mead Company. Hal 20

²⁶Asfar.2006, *Op. Cit*, hal:201

(*Retrospektif*), dan keadaan ekonomi nasional di bawah pemerintahan sekarang dibandingkan tahun-tahun yang akan datang²⁷.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berasumsi bahwa variabel identifikasi partai, orientasi kandidat, dan evaluasi ekonomi juga dapat menjelaskan fenomena perubahan atau pergeseran perolehan suara partai politik terutama pada pemilu legislatif tahun 2014 yang terjadi di Kota Bukittinggi. Melihat kepada variabel identifikasi partai terdapat gambaran bahwa, masih adanya dukungan terhadap partai lama seperti Golkar, PPP, Demokrat serta PAN yang dalam pemilihan masih mempati posisi 5 besar. (lihat tabel I.1)

Selain itu Peneliti juga berasumsi bahwa penyebab perubahan perolehan suara partai politik tersebut dikarenakan perilaku memilih masyarakat kota bukittinggi yang tergolong dalam menentukan pilihannya melihat kepada orientasi tokoh baik tokoh yang akan di pilih maupun tokoh partai politik. Hal ini tergambar pada pra Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 sosok Prabowo di anggap sebagai penjabaran pemikiran Bung Karno tentang nasionalisme, kesejahteraan rakyat NKRI. Selain tokoh politik ada fenomena yang berkembang pada masyarakat kota Bukittinggi bahwa anggota legislatif periode 2009-2014 masih ada yang kembali meraih simpati masyarakat seperti Jusral Adek Sos. MM dari Partai Golkar, Ibnu Aziz dari PKS serta Yontrimansyah dari Partai Demokrat yang memang menurut masyarakat mempunyai kemampuan dalam hal mewakili mereka dilegislatif. Hal ini juga tergambar bahwa mereka mampu membantu

²⁷Mujani,2012, *Op.Cit.*, hal 33.

masyarakat seperti contoh Yontrimansyah yang membantu masyarakat terutama dalam bidang pendidikan²⁸.

Terakhir peneliti berasumsi bahwa untuk menjelaskan perilaku memilih di Pemilihan Legislatif tahun 2014 di kota Bukittinggi ini dengan menggunakan variabel evaluasi ekonomi yang secara sederhana menggambarkan bahwa seorang pemilih akan memilih partai atau calon bila mereka mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal ini tergambar bahwa beberapa tahun belakangan keadaan ekonomi merosot terlihat bahwa adanya kenaikan harga BBM yang terjadi 5 kali semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kenaikan ini berimpas pada keadaan ekonomi terutama ekonomi masyarakat. Dalam hal ini peneliti juga berasumsi bahwa efek ekonomi ini berimpas pada menurunnya jumlah suara yang di dapati oleh partai tertentu yang mendukung program pemerintah. Oleh sebab itu faktor evaluasi ekonomi ini menjadi pantas untuk menjelaskan perilaku memilih masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas dengan segala permasalahannya, cukup menarik dijadikan sebagai kajian dalam melihat bentuk Perilaku Memilih Masyarakat kota Bukittinggi pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014. Dalam penelitian ini, peneliti memusatkan rumusan masalah pada bentuk rumusan masalah asosiatif hubungan kausal. Rumusan masalah asosiatif hubungan kausal yaitu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua

²⁸<http://www.sumbaronline.com/berita-10944-yontrimansyah-targetkan-bukittinggi-jadi-kota-pendidikan.html>. 4 September 2015, Pukul 22:03WIB

variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat²⁹. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Apakah variabel Identifikasi Partai mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?
2. Apakah variabel Kualitas Calon mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?
3. Apakah variabel Evaluasi ekonomi mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, terdapat maksud dan tujuan yang ingin dicapai sehingga penelitian ini bermanfaat secara global. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh hubungan antara variabel Identifikasi Partai terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
2. Mengetahui pengaruh hubungan antara variabel Kualitas Calon terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
3. Mengetahui pengaruh hubungan antara variabel evaluasi ekonomi terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

²⁹Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. Hal 61-62

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di segala lini bidang perpolitikan terutama sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk itu dalam penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis (Akademis)

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan teori ilmu politik, khususnya perilaku politik di tingkat lokal tentang pendekatan perilaku memilih.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk peneliti selanjutnya dalam mengkaji perilaku memilih.

2. Manfaat Empiris (Praktis)

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang perilaku memilih masyarakat dalam perpolitikan di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman para aktor politik tentang perilaku memilih masyarakat yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Bukittinggi (KPU dan Partai Politik).

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran dan manfaat tentang perilaku memilih masyarakat bukittinggi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 bagi Ormas, LSM, dan pihak yang berkepentingan.

E. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian penelitian terdahulu, model-model perilaku memilih, kerangka berfikir, dan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan dan tipe penelitian, populasi dan sampel serta teknik sampling, definisi operasional dan indikator, validitas dan reliabilitas, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai daerah penelitian yang meliputi keadaan geografis, kependudukan, sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini menyajikan data dan analisis data yang meliputi mendeskripsikan data mulai dari profil demografi responden, pengujian hipotesis, dan menganalisis mulai dari variabel identifikasi partai, kualitas calon, evaluasi ekonomi dengan perilaku memilih.

BAB VI DISKUSI

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang diutarakan pada BAB sebelumnya dengan teori yang ada. Pembahasan hasil penelitian tersebut meliputi hubungan antara identifikasi kepartaian dengan perilaku memilih

masyarakat, hubungan antara kualitas calon dengan perilaku memilih masyarakat dan hubungan antara evaluasi ekonomi dengan perilaku memilih masyarakat.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran yang dianggap penting bagi pihak yang membutuhkan.

